

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN KARTU PENYANDANG DISABILITAS JAKARTA DI KELURAHAN JATNEGARA

**MOHAMMAD RUSWANTO
DEDY KUSNA UTAMA**

*Studi Administrasi Publik Fakultas
Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial Dan Manajemen Stiami
email:dedykusnautama@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini adalah penelitian mengenai implementasi program bantuan kartu penyandang disabilitas Jakarta di Kelurahan Jatinegara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi program bantuan penyandang disabilitas ditempat tersebut. Penelitian ini menggunakan teori George C Edward III yang mengemukakan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh 4 aspek yaitu komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi. Metode pengumpulan data dengan pedoman wawancara, dokumentasi, dan studi litelature untuk mendukung analisa dan observasi untuk mengetahui secara langsung keadaan yang sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan implementasi program bantuan kartu penyandang disabilitas di kelurahan Jatinegara setelah ditinjau dari rumusan permasalahan penelitian, maka dalam pengimplementasiannya sudah cukup baik dan signifikan, namun harus lebih banyak lagi improvisasi untuk sarana dan prasarana maupun sumber daya yang ada.

Kata Kunci: Teori implementasi, Program bantuan Disabilitas

ABSTRACT

This study discusses the implementation of the Jakarta Disability Card assistance program in Jatinegara. The aim is to find out the extent of the implementation of the assistance program for persons with disabilities in the area. This study used George C Edward III's which suggests that the implementation of public policy is influenced by four aspects, namely communication, resources, attitudes and bureaucratic structure. Data was collected through interviews, documentation, and literature studies to support analysis and observation to find out firsthand the actual situation. The results showed that in terms of the formulation of the research problem, the card assistance program for persons with disabilities in the Jatinegara area had been implemented quite well and significantly. However, it is necessary to make more improvements to facilities and infrastructure as well as resources.

Keywords: *Implementation theory, Disability assistance program*

PENDAHULUAN

Masalah sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya, masalah sosial dipandang oleh sejumlah orang dalam masyarakat sebagai sesuatu kondisi yang tidak diharapkan. Difabel atau disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan

aktifitas dan pembatasan partisipasi, gangguan adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya dengan kata lain kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau suatu tindakan. *Difabel* adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam menjalankan aktifitas berbeda bias dibandingkan dengan orang-orang kebanyakan sedangkan disabilitas didefinisikan sebagai seseorang yang belum mampu berakomodasi dengan lingkungan sekitarnya sehingga menyebabkan disabilitas. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya. (Dewantara, 2011). Dengan dilakukannya Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas cukup efektif untuk mengetahui seberapa banyak penyandang disabilitas yang akan mendapatkan bantuan dari Pemerintah, Kantor Kelurahan Jatinegara sudah melaksanakan sosialisasi tersebut guna mendapatkan data valid penyandang disabilitas. Program kebijakan pemerintah bagi penyandang disabilitas cenderung berbasis kasihan (*charity*) sehingga kurang memberdayakan penyandang disabilitas untuk terlibat dalam berbagai masalah, kurangnya sosialisasi peraturan tentang penyandang disabilitas menyebabkan perhatian yang sangat kurang. Maka dari itu dibuatlah Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas. Setelah dilakukan survey lapangan.

Seiring dengan tahun anggaran berjalan, untuk itu penulis bermaksud untuk membandingkan data penerima bantuan tahun 2019 dengan tahun 2020 agar dapat melihat perkembangan implementasi Pelayanan Publik mengenai Bantuan Sosial sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Sosial yang merupakan objek dalam penelitian ini. Berdasarkan database Dinas Sosial Kelurahan Jatinegara hasil data, ditemukan warga tidak memiliki identitas sebanyak 70 orang, minim pengetahuan 30 orang dan keluarga menutupi 20 orang. Data sebanyak 120 tersebut kemudian diinput kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial, data akan dipadankan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, setelah itu nama-nama tersebut ditetapkan sebagai calon penerima bantuan oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Warga penyandang disabilitas akan menerima Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta dengan nominal sebesar RP.300.000,- /bulan dan dapat diambil di ATM DKI dalam waktu 3 bulan sekali dengan nominal Rp.900.000,-. Penulis melakukan penelitian di Kelurahan Jatinegara karena kelurahan tersebut adalah tempat dimana penulis bekerja, selain itu setelah dilihat dari hasil survey di kelurahan tersebut padat penduduk dan banyak masyarakat yang ekonominya menengah kebawah. Sehingga dengan ini penulis menganalisa program bantuan disabilitas di kelurahan jatinegara.

Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan Latar belakang diatas peneliti mengidentifikasi dengan Fokus pada penelitian dengan tujuan lebih mengerucut pada Analisis Peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2019 mengenai Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas di Kelurahan Jatinegara.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis:

1. Untuk menganalisis Implementasi Pelayanan Publik melalui bantuan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta di Kelurahan Jatinegara.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat dalam implementasi pelayanan publik melalui bantuan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta di Kelurahan Jatinegara.

3. Untuk menganalisis upaya hambatan dalam Implementasi Pelayanan Publik melalui bantuan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta di Kelurahan Jatinegara.

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Menurut Mulyadi (2015:12) “Sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan”. Menurut Lister dan Isril (2013:136) “Mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”. Menurut Horn (Tahir 2014:55)

Implementasi kebijakan sebagai tahap penyelenggaraan kebijakan segerasetelah ditetapkan menjadi undang-undang. Dalam pandangan luas implementasi kebijakan diartikan sebagai pengadministrasian undang-undang kedalam berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik-teknik yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dan dampak yang ingin diupayakan oleh kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

b. Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Metter dan Van Horn menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan merupakan sebuah abstraksi atau performansi yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi dan dipengaruhi oleh enam variable, yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier disebut dengan *A Framework for Policy Implementation Analysis*. Model ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasikan variable-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III dengan menggunakan pendekatan top down, dalam menganalisa implementasi kebijakan model ini berfokus pada empat variable yang dianggap menentukan proses implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi.

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan Eguene Bardach dalam melakukan analisa lebih menekankan pada tawar menawar, persuasi, dan manuver oleh kelompok-kelompok kepentingan guna memaksimalkan pengaruh mereka dalam hal pelaksanaan atau implementasi.

Model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Christopher Hood dalam bukunya *Limit To Administration* menjelaskan bahwa sekurang-kurangnya terdapat lima syarat agar implementasi kebijakan dapat berlangsung sempurna, yaitu: implementasi adalah produk dari organisasi yang padu seperti militer dengan garis komando yang jelas,

norma-norma ditegakan dan tujuan ditentukan dengan jelas, orang-orangnya dipastikan dapat melaksanakan apa yang diminta, harus ada komunikasi yang sempurna didalam dan antar organisasi, tidak ada tekanan waktu.

c. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Salah satu pendapat yang sangat singkat dan tegas tentang keberhasilan atau kegagalan dari Implementasi Kebijakan disampaikan oleh Weimer dalam Pasalong (2012:59). Menurut mereka ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu 1. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai seberapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. 2. Hakikat kerja sama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerja sama merupakan suatu assembling produktif. 3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya. Implementasi kebijakan mempunyai berbagai hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan publik.

4. Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dalam pokok konvensi point 1 (pertama) pembukaan memberikan pemahaman, yakni Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.

Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan atau yang dapat mengganggu aktifitas. Masalah sosial utama yang dihadapi penyandang cacat “disabilitas” adalah bahwa mereka abnormal dalam tingkat yang sedemikian jelasnya sehingga orang lain tidak merasa enak atau tidak mampu berinteraksi dengannya. Menurut John C. Maxwell. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai sesuatu yang luar biasa yang secara signifikan membedakannya dengan anak-anak seusia pada umumnya. Keluarbiasaan yang dimiliki anak tersebut dapat merupakan sesuatu yang keluarbiasaan yang dimiliki anak tersebut dapat merupakan sesuatu yang positif, dapat pula yang negatif. Menurut IG.A.K Wardani

METODE PENELITIAN

Peninjauan dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus, adalah metode pengumpulan data yang bersifat integratif dan komprehensif. Integratif artinya menggunakan berbagai teknik pendekatan dan bersifat komprehensif yaitu data yang dikumpulkan meliputi seluruh aspek pribadi individu secara lengkap (Ketut, 2016). Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai analisis implementasi pelayanan publik melalui bantuan

kartu penyandang disabilitas Jakarta di Kelurahan Jatinegara. Selain itu, menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan program bantuan kartu penyandang disabilitas Jakarta.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui: 1. Observasi, yakni dengan melakukan peninjauan terhadap lokasi penelitian, sebagaimana disesuaikan dengan obyek yang diteliti. 2. Melakukan wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. 3. Studi literatur, yaitu melakukan pencarian terhadap berbagai sumber tertulis, baik berupa buku-buku, arsip, majalah, artikel, jurnal dan dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan adalah deskriptif –analitik yaitu metode dalam mengolah data-data yang telah dikumpulkan dengan menganalisisnya sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan dengan analisa data kualitatif berupa reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan dan verifikasi. 1. Reduksi Data, data yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan kemudian direduksi untuk memilah data pokok yang penting yaitu yang berkaitan dengan focus tema penelitian. Kemudian data tersebut disusun secara sistematis agar mudah untuk difahami sehingga pemahaman ini akan membantu menjawab pertanyaan baru berkaitan dengan tema penelitian. 2. Data Display atau Penyajian Data, adalah data yang telah mengalami proses reduksi yang langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, maupun diagram. Tujuan penyajian data disini adalah untuk mempermudah dalam memahami hal yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan hal-hal yang telah difahami tersebut. Data yang didapat kemudian dijelaskan hubungannya dengan data yang lain sehingga terbentuk suatu korelasi data terkait permasalahan penelitian. 3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi, yaitu penarikan kesimpulan didasarkan atas rumusan masalah yang difokuskan lebih spesifik dan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil analisis merupakan dari persoalan penelitian yang telah ditetapkan.

Uji Keabsahan Data

Kemudian untuk mengetahui Penilaian validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2016:38) terdapat empat kriteria untuk menilai keabsahan data yang ditemukan, yaitu. Kredibilitas, Transferabilitas, Dependabilitas, Konfirmabilitas. (***CARI TAU DULU, BELUM DIKERJAIN***)

Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi tempat pelaksanaan penelitian ini adalah Kantor Kelurahan Jatinegara. Dalam pemaparan jadwal penelitian, proses pelaksanaan penelitian dimulai dari bulan April 2021 sampai dengan bulan Juli 2021.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Objek Penelitian

Jakarta sebagai Pusat Pemerintahan dan Ekonomi di Indonesia, menjadi Indikator Kemajuan kita sebagai sebuah bangsa. Untuk itu Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan sebuah ‘Rencana Aksi’ untuk membangun pondasi Infrastruktur Sosial yang kokoh, melalui ‘Tiga Pilar’ Masyarakat Kasih Sayang yaitu; Kohesi Sosial, Ketahanan Sosial, dan Keadilan Sosial. Diharapkan dengan pembangunan ketiga pilar infrastruktur

sosial tersebut, akan tercipta masyarakat kasih sayang di Provinsi DKI Jakarta, yaitu masyarakat yang didasarkan bukan pada kompetisi dan ego individualistik, melainkan pada kelemahan-lembutan dan kesadaran hidup yang saling membutuhkan. Sehingga akan terbentuk keyakinan di dalam hati setiap Warga Jakarta, bahwa ketika mereka berbuat baik kepada sesama warga lainnya, berarti mereka juga telah berbuat baik kepada Tuhan.

Kohesi Sosial adalah Pilar pertama yang akan dibangun untuk menciptakan Masyarakat Kasih Sayang di Provinsi DKI Jakarta. Walaupun kami menyadari tidak mudah untuk membuat sebagian besar Warga Jakarta, yang sudah terbiasa hidup secara individualistik untuk mulai saling peduli dan saling membantu dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Tetapi kami berkeyakinan besar bahwa sesungguhnya di dalam hati setiap Warga Jakarta, telah ada bibit kesadaran untuk membangun kepedulian sosial pada lingkungan sekitar tempat tinggal mereka, hanya perlu dipicu melalui sebuah gerakan sosial yang akan dimulai oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, dengan pendirian Wadah Ekonomi Kolektif; Penyaluran Zakat, Waqaf, Infak dan Sedekah, Milik Warga dan akan dikelola sendiri oleh Warga setiap Kelurahan, yang dinamakan; Koperasi Amanah Warga Nusantara – Kelurahan (Kawan Kelurahan).

Ketahanan Sosial adalah Pilar kedua yang akan terbangun secara otomatis, setelah Kohesi Sosial – Masyarakat Kasih Sayang, terlaksana dalam kehidupan sehari-hari Warga Jakarta. Melalui Lembaga Sosial Ekonomi ‘Kawan Kelurahan’, Warga Jakarta akan memiliki ‘Sarana’ untuk menyantuni sesama Warga yang sedang tertimpa musibah, atau yang kurang beruntung di sekitar tempat tinggal mereka. Dinas Sosial akan mengadvokasi dan memberikan edukasi kepada warga untuk membangun Kekuatan Sosial-Ekonomi secara Kolektif melalui Gerakan ‘Kawan Jakarta’.

Keadilan Sosial adalah Pilar ketiga yang akan terbangun sebagai indikator keberhasilan Pembangunan Masyarakat Kasih Sayang di Provinsi DKI Jakarta. Keadilan Sosial akan terjadi seiring terbangunnya Kekuatan Sosial-Ekonomi Warga Jakarta, yang memiliki daya tawar luar biasa besar terhadap seluruh barang dan jasa yang dikonsumsi oleh Warga sehari-hari. Akan terjadi pergeseran kekuatan kapitalisasi terhadap pemenuhan kebutuhan pokok dari kelompok konglomerasi kepada Warga Jakarta sendiri, dimana ini akan menjadi momentum terciptanya sebuah Peradaban Madani, melalui Masyarakat Kasih Sayang di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data yang sudah dikemukakan pada sub sebelumnya, maka berikut akan dipaparkan pembahasan hasil penelitian terkait implementasi program bantuan Kartu Penyandang Disabilitas di Kelurahan Jatinegara.

1. Implementasi Kebijakan dalam program Bantuan Kartu Penyandang Disabilitas.
 - a) Komunikasi dalam implementasi program bantuan kartu penyandang disabilitas di kelurahan Jatinegara sudah efektif. Hal tersebut dilakukan pada saat penerima bantuan tepat pada sasaran
 - b) Sumber daya di kantor dan wilayah kelurahan Jatinegara cukup memadai, hanya saja fasilitas untuk petugas lapangan masih kurang mendukung karena penggunaan jaringan internet yang tidak difasilitasi saat mobile. Namun untuk pemanfaatan sumber daya yang ada cukup baik.
 - c) Disposisi / sikap para pengambil kebijakan dalam pelaksanaan program bantuan disabilitas sudah baik. Para pelaksana menjalankan tugas sesuai prosedur yang ada dan sesuai kebijakan yang telah dibuat oleh pemda setempat.
 - d) Struktur birokrasi yang ada di kantor kelurahan Jatinegara cukup baik dimana sudah sepenuhnya mendukung dalam proses penyusunan dan pelaksanaan secara efektif dan efisien.

2. Faktor Penghambat

Permintaan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan program ini anggaran masih terbatas dan begitu juga dengan anggaran yang dikeluarkan untuk petugas lapangan serta adanya ketidakterbukaan dari sumber daya yang di kaitkan.

3. Upaya Mengatasi Hambatan

Harus selalu mengkoordinasikan secara rutin antar pihak terkait, dan perlu meningkatkan kesadaran sumberdaya supaya dapat meningkatkan kualitas yang lebih baik untuk pelaksanaan program bantuan agar sesuai, dan untuk permintaan anggaran kepada pusat mesti harus direalisasikan dengan tepat dan sesuai kebutuhan untuk segala yang terkait dari program ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis dalam penelitian ini seperti dibahas dalam sub bab sebelumnya, maka kesimpulan dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi program bantuan kartu penyandang disabilitas Jakarta di Kelurahan Jatinegara sudah terlaksana dengan baik terutama dari komunikasi, disposisi dan sikap, meskipun ada beberapa fasilitas yang masih kurang dalam pelaksanaan program tersebut.
2. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan program bantuan untuk penyandang disabilitas dalam anggaran tidak langsung cepat direalisasikan dan masih harus menunggu dan perlu waktu untuk didistribusikan langsung bantuannya kepada penyandang disabilitas dan sumberdaya manusia yang masih kurang memiliki sikap kompetensi dalam pelaksanaan program ini.
3. Upaya mengatasi hambatan dalam implementasi program bantuan penyandang disabilitas harus melalui sumberdaya yang kompetensi dan pihak terkait harus selalu berkoordinasi dalam pendataan tepat sasaran.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diajukan penulis sebagai hasil dari penelitian ini dalam rangka keberhasilan implementasi program bantuan penyandang disabilitas Jakarta di Kelurahan Jatinegara adalah sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan bagi pelaksana dalam kinerja untuk pelaksana yang mendata warga penerima bantuan ini, serta memperhatikan fasilitas yang ada baik sarana dan prasarana dan juga anggaran yang dibutuhkan untuk program ini.
2. Perlunya efektivitas dan kerjasama yang kompeten antar sumberdaya yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Dewantara, A.W. 2017. Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Dwiyanto, A. 2013. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Gie, L. 2011. Pengertian Kependudukan dan Perincian Ilmu Administrasi. Yogyakarta, Karya Kencana.
- Handyaningrat, S. 2013. Pengantar suatu Ilmu administrasi dan Manajemen. Jakarta: Gunung Agung.
- Ketut, D., 2016. Organisasi Administrasi Bimbingan Konseling Di Sekolah.
- Maxwell, J.C., 2002. Leadership 101: What every leader needs to know. HarperCollins Leadership.
- Newman, W.H. 2013. Administrative Action. New York: Prentice-Hall.
- Panji, S. 2013. Public Administration Theory and Applications of Good Governance.
- Pasolong, H. 2011. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, H., 2012. Metodologi Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Sudriamunawar, H. 2013. Pengantar Studi Administrasi Pembangunan. Bandung: Mandar Maju.
- Sumaryadi, I.N. 2011, Sosiologi Pemerintahan. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Syafiie, I.K. 2013. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tahir, A. 2014. Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bandung: Alfabeta.
- Tead, O. 2017. The art of administration. Mcgraw-hill.
- Tjiptono, F., 2015. Strategi Pemasaran Edisi 3. Yogyakarta: Andi.
- Yusuf. 2011. Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja. Jakarta.
- Zarkani, S.A., 2020. Penerapan Strategi Kepemimpinan yang Melayani di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin.

JURNAL:

- Andari, S. 2016. Implementasi Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas dan Dampak terhadap Keterpenuhan Kebutuhan Dasar. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, 40(1).
- Aulia, F.D.A.D., Asiah, D.H.S. and Irfan, M. 2020. Peran Pemerintah Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Penyandang Disabilitas. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), 1(1).
- Chakrabarty, D., Mandal, P.K., Manna, N. Mallik, S., Ghosh, P., Chatterjee, C., Sardar, J.C., Sau, M. and Roy, A.S., 2010. Functional disability and associated chronic conditions among geriatric populations in a rural community of India. Ghana medical journal, 44(4).
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier, 2011. Implementation and Public Policy. USA: Scott Foresman and Company.
- Mulyadi, E. 2015. Penerapan Model Project Based Learning untuk Meningkatkan Kinerja dan Prestasi Belajar Fisika Siswa SMK. Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, 22(4), pp.385-395.
- Propiona, J.K. 2021. Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas. Jurnal Analisa Sosiologi, 10.
- Price, P. and Takamine, Y., 2011. The Asian and Pacific decade of disabled persons 1993-2002: What have we learned. Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal, 14(2), pp.115-127.
- Saputra, A.B., Luhur, D.B. and Wiguna, P.A. 2017. Tantangan Dinas Sosial Dalam Peningkatan Pelayanan Disabilitas Kota Malang Di Era Industri 4.0. Prosiding Simposium Nasional "Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0", pp.1521-1550.
- Taufik, M, and Isril. 2013. Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. Jurnal Kebijakan Publik, 4(2).

- Vuspita, K. 2018. Implementasi Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru. JOM FISIP, 5(2).
- Wardani, K.S.K., Warthini, N.L.P.N.S., Rahmatih, A.N., Astria, F.P. and Nurwahidah, N., 2020. Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sdn 20 Mataram. Progres Pendidikan, 1(2), pp.99-105.
- Wayong, M. 2011. Engendering academic leadership and management: Bridging the gap at the state universities of Makassar, Indonesia (Doctoral dissertation, Flinders University, Women's Studies Department).